

## Kepedulian Mahasiswa UPI Terhadap Perkembangan Pemilu Indonesia Tahun 2024

Eva Rachel Meisyana Sianipar<sup>1</sup>, Anggy Septriyani<sup>2</sup>, Tiara Dwi Putri NSP<sup>3</sup>, Maulia Depriya Kembara<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Pendidikan Indonesia

Korespondensi penulis: [evarachelmeisyana@upi.edu](mailto:evarachelmeisyana@upi.edu)<sup>1</sup>

**Abstract.** *This paper aims to reveal the paradigm in fostering public awareness in democracy, the extent and form of plurality and democracy of Indonesian society in the future. Discusses the concept of the Sila Kerakyatan as the basis for the Indonesian political system led by wisdom in deliberation and representation, and its implications for the level of voter participation in the electoral process. The method used is descriptive analysis with a qualitative approach that provides an overview of problem solving based on critical analysis and the author's interpretation, based on literature that the author gets from various sources and references. The findings obtained Growing public awareness in instilling democratic values, can be done by (a) Opening a democratic class this program aims to introduce, foster habituation to democracy. Education of democratic awareness from an early age can and must continue to be carried out by various groups, the essence of democracy at the individual level is internalized, so efforts to uphold democracy in structural and cultural currents can be realized. (b) Organizing character education, building a democratic society is a necessity that must be carried out by a country that adheres to a democratic system. Democracy is not understood as a way of managing government but as democratization.*

**Keywords:** Democracy, public awareness, Pancasila.

**Abstrak.** Tulisan ini bertujuan untuk mengemukakan paradigma dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, sejauh mana dan bagaimana bentuk pluralitas dan demokrasi dari masyarakat Indonesia di masa depan. Pada era globalisasi ini Pancasila sangat diperlukan sebagai pembatas agar kita dapat memilih mana budaya yang dapat diterima di Indonesia dan yang bermanfaat. Membahas konsep Sila Kerakyatan sebagai dasar bagi sistem politik Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta implikasinya terhadap tingkat partisipasi pemilih dalam proses pemilu. Metode yang digunakan deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif menghasilkan gambaran pemecahan masalah yang didasarkan pada tinjauan kritis dan interpretasi penulis terhadap literatur yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan referensi. Temuan menunjukkan bahwa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai demokratis dapat dicapai melalui dua cara, (a) dengan mengadakan program kelas demokratis yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menggalakkan praktik demokrasi. Pendidikan kesadaran demokrasi sejak dini dianggap penting dan harus terus dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. Hal ini diyakini dapat menginternalisasi esensi demokrasi pada tingkat individual, sehingga memungkinkan upaya-upaya untuk memperkuat demokrasi baik dalam pada arus struktural maupun kultural dapat terwujud. (b) melalui penyelenggaraan pendidikan karakter yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang menganut nilai-nilai demokratis. Pendidikan karakter dianggap sebagai suatu kebutuhan yang tak terhindarkan bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam konteks ini, demokrasi bukan hanya dipahami sebagai metode pengelolaan pemerintahan, tetapi sebagai sebuah proses demokratisasi yang melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat.

**Kata kunci:** Demokratis, kesadaran masyarakat, Pancasila.

### LATAR BELAKANG

Manusia secara alami hidup dan berinteraksi dalam berbagai lingkungan sosial sepanjang hidupnya, seperti yang diungkapkan oleh Widjaja (1986). Subadi (2003) menekankan pentingnya hubungan antarindividu dalam masyarakat, terutama dalam konteks mahasiswa yang harus menerapkan nilai-nilai demokrasi untuk menciptakan suasana harmonis dan

memainkan peran sebagai agen perubahan. Demokrasi, yang berasal dari Yunani Klasik pada abad ke-5 SM, menekankan pada kekuasaan rakyat (Miriam, 2002). Konsep demokrasi di Indonesia berubah dari sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi menunjukkan pengaruh dari cara pemerintahan yang modern. Mahasiswa juga harus selalu terlibat dalam prinsip pemerintahan yang demokratis agar mereka bisa berperan lebih baik dengan menggerakkan perubahan positif dalam masyarakat untuk transformasi yang lebih baik.

Istilah "demokrasi" pertama kali muncul pada abad ke-5 SM. Istilah ini berasal dari dua kata Yunani kuno, yaitu "demos" yang artinya rakyat, dan "kratos" atau "cratein" yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Secara konseptual, demokrasi dapat dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan yang kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Ini berarti bahwa pemerintahan dijalankan oleh rakyat sendiri, yang dikenal dengan istilah "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Di Indonesia, mahasiswa memandang demokrasi sebagai sarana untuk membawa perubahan yang positif bagi masyarakat, yang nantinya akan membawa kebaikan bagi semua pihak (Miriam, hlm. 10, 2002). Di Indonesia, pemahaman tentang demokrasi saat ini dipengaruhi oleh konsep demokrasi modern. Mulai dari masa awal kemerdekaan hingga era reformasi, demokrasi mengalami berbagai perubahan dan evolusi yang berbeda.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 tentang 2009 tentang Kepemudaan, generasi muda atau pemuda didefinisikan sebagai "Warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun". Perubahan politik dari kaum milenial dan generasi Z menunjukkan bahwa mereka adalah bagian besar dari populasi. Mereka disebut sebagai generasi digital karena tumbuh bersama teknologi informasi. Mereka aktif di berbagai platform online yang mencerminkan kehidupan mereka. (Kadir, 2022). Pemahaman tentang politik adalah hal yang penting bagi generasi milenial dan generasi Z untuk memahami tanggung jawab dan hak mereka dalam pemilu serentak 2024. Ini juga membantu mereka untuk lebih memahami pentingnya berpartisipasi dalam pemilu dan menggunakan hak suara mereka dengan bijak (Siregar, 2023).

Nilai-nilai demokrasi tentu saja menjadi salah satu objek kajian di perguruan tinggi, khususnya oleh mahasiswa yang menempuh studi di Universitas Pendidikan Indonesia. Kajian ini disajikan dengan rincian yang cermat dengan harapan mahasiswa mampu memahami nilai-nilai tersebut sebagai landasan bagi peran mereka sebagai agen perubahan yang berkontribusi pada kemajuan masyarakat.

## **KAJIAN TEORITIS**

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Demokrasi sering dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang paling mewakili kepentingan dan kehendak rakyat. Konsep ini menekankan pada kebebasan politik, hak asasi manusia, serta partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Mahasiswa, sebagai agen perubahan dan intelektual muda, memegang peran penting dalam mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi ini. Mahasiswa sering menjadi motor penggerak perubahan sosial dan politik, mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam kebijakan publik. Partisipasi mahasiswa dalam gerakan sosial, pemilihan umum, dan advokasi hak asasi manusia adalah contoh konkret dari bagaimana mereka dapat memperkuat fondasi demokrasi dalam masyarakat. Melalui keterlibatan aktif dalam proses politik dan sosial, mahasiswa tidak hanya membentuk budaya demokrasi yang kuat, tetapi juga memperkuat jembatan antara pemerintah dan rakyat, membawa harapan akan masa depan yang lebih demokratis dan inklusif.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, yang menurut Creswell (2016), melibatkan eksplorasi dan pemahaman makna dari individu atau kelompok terkait dengan masalah sosial. Metode kualitatif umumnya digunakan untuk mempelajari berbagai aspek kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, konsep, fenomena, masalah sosial, dan topik lainnya. Studi kasus dipilih sebagai metode penelitian yang sesuai untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengeksplorasi sejauh mana tingkat kepedulian mahasiswa UPI terhadap perkembangan Pemilu di Indonesia pada tahun 2024. Creswell mengidentifikasi lima pendekatan dalam penelitian kualitatif, salah satunya adalah fenomenologi. Dalam studi fenomenologi, fokusnya bukanlah kehidupan individu, melainkan pada konsep atau fenomena tertentu. Tujuan studi ini adalah untuk memahami makna pengalaman individu terkait dengan fenomena tersebut. Menurut Sugiyono (2010:5), penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria seperti bidang, tujuan, metode, tingkat eksplanasi, dan jenis data. Dalam konteks ini, penelitian yang dibahas adalah penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus tunggal. Studi kasus yang dimaksud terkait pelaksanaan nilai demokrasi di kalangan mahasiswa UPI. Subjek penelitian ini adalah dua mahasiswa dari setiap fakultas di Universitas Pendidikan Indonesia Bumi Siliwangi selama tahun akademik 2023. Objek penelitian adalah implementasi nilai demokrasi di antara mahasiswa UPI selama tahun akademik tersebut. Sumber data yang digunakan mencakup informasi dari informan, peristiwa terkait pelaksanaan

nilai demokrasi di kalangan mahasiswa, wawancara dengan responden, dan dokumentasi yang berisi catatan dari hasil wawancara dengan perwakilan responden.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Etika dan integritas penting dalam konteks pemilu dan demokrasi, karena keduanya memberikan dasar bagi partisipasi yang adil. Hal ini memastikan jika pemilih dipandu oleh informasi yang benar serta pemilu dipantau menggunakan praktik yang bersih dan transparan. Kesadaran akan urgensi etika dan integritas tak hanya membangun kepercayaan terhadap sistem pemilu namun juga dengan memastikan bahwa setiap suara warga negara dihormati dan terhitung dengan akurat, sehingga menjaga integritas demokrasi. Pancasila dan etika tidak dapat dipisahkan, sebab keduanya mempunyai nilai-nilai yang mengandung hal-hal yang baik.

Sebagai suatu sistem etika, Pancasila mengacu pada prinsip-prinsip moral dan etika yang mengatur perilaku individu dan masyarakat dalam interaksi dan hubungannya dengan makhluk sosial lain, lingkungan hidup, dan lingkungan sekolah serta Tuhan. Integrasi nasional merupakan upaya menyatukan perbedaan - perbedaan dalam suatu negara untuk mencapai keharmonisan dan keharmonisan nasional. Sebagai dasar ideologi negara Indonesia, Pancasila mengusung nilai-nilai yang mencerminkan nasionalisme dan keberagaman. Terdiri dari lima asas yang saling melengkapi, Pancasila menjadi landasan bagi terbangunnya jati diri bangsa yang kokoh dan langgeng, sesuai dengan prinsip demokrasi yang terkandung dalam Pancasila. Prinsip yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu merupakan prinsip keempat yang terkait dengan demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana mahasiswa UPI mengamalkan nilai-nilai umum tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian secara survei, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di setiap fakultas UPI, maka didapat beberapa macam respons dari para mahasiswa di UPI. Pertamanya kami membagikan sebuah kuesioner yang dimana isinya berupa 7 pertanyaan pendapat mahasiswa UPI terkait perkembangan pemilihan umum yang ada di Indonesia. Dari total 43 mahasiswa yang merespon survei yang telah dilaksanakan, ternyata kami mendapatkan hasil yang bervariasi. 60,5% responden menyatakan “Setuju” pada pernyataan “Demokrasi sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari Anda”. 55,8% responden menyatakan “Setuju” pada pertanyaan “Apakah musyawarah bagian dari perwujudan demokrasi”.

60,5% responden menyatakan “Tidak Setuju” pada pernyataan “Demokrasi hanya berlaku pada diskusi dengan jumlah massa yang banyak”. 69,8% responden menyatakan “Ya” pada pertanyaan “Apakah Anda mengikuti perkembangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilakukan pada tahun 2024 di negara kita?”. 72,1% responden menyatakan “Ya”

pada pertanyaan “Apakah pemilu yang akan dilakukan pada 2024 ini berpengaruh pada kehidupan Anda?”. 81,4% responden menyatakan “Ya” pada pertanyaan “Seandainya kandidat yang Anda pilih sebagai pemimpin negara selanjutnya tidak terpilih, apakah Anda akan tetap mendukung regulasi yang ditetapkan oleh mereka?”. Lalu pertanyaan terakhir, “Menurut Anda, apakah demokrasi di Indonesia sudah sesuai dengan cita-cita bangsa?” didapat 69,8% responden yang menyatakan “Sudah”, lalu bagi yang merasa bahwa belum sesuai, mereka juga menyatakan alasan mereka. Hasil dari survei ditunjukkan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Distribusi Respons Terbanyak**

Pernyataan / Pertanyaan	Respon terbanyak	Persentase
Demokrasi sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari Anda	“Setuju”	60,5 %
Apakah musyawarah bagian dari perwujudan demokrasi?	“Setuju”	55,8%
Demokrasi hanya berlaku pada diskusi dengan jumlah massa yang banyak	“Tidak Setuju”	60,5%
Apakah Anda mengikuti perkembangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilakukan pada tahun 2024 di negara kita?	“Ya”	69,8%
Apakah pemilu yang akan dilakukan pada 2024 ini berpengaruh pada kehidupan Anda?	“Ya”	72,1%
Seandainya kandidat yang Anda pilih sebagai pemimpin negara selanjutnya tidak terpilih, apakah Anda akan tetap mendukung regulasi yang ditetapkan oleh mereka?	“Ya”	81,4%
Menurut Anda, apakah demokrasi di Indonesia sudah sesuai dengan cita-cita bangsa?	“Sudah”	69,8%

Sumber: Data Survei

Alasan yang diberikan oleh setiap responden terkait kesesuaian demokrasi dengan cita-cita bangsa ini berbeda-beda. Namun disini peneliti ingin merangkum alasan yang paling umum diberikan. Pertama, banyak yang merasa lebih baik jika demokrasi modern menggunakan perwakilan rakyat secara langsung, bukan partai. Mereka merasa banyak sekali hak kebebasan berbicara ditiadakan. Sedikit sekali ruang untuk berdiskusi antara pemerintah dengan masyarakat. Bahkan ketika sekalipun ada, pemerintah seakan anti kritik dan enggan menanggapi masukan masyarakat.

Alasan kedua, permasalahan di aturan parliamentary threshold (4%) dan presidential threshold (20%) yang mengakibatkan dalam pemilu ke pemilu masyarakat tak disuguhkan kandidat yang banyak (dalam pilpres) lantaran harus menggalang dukungan Parlemen. Alhasil tiket Parlemen tersebut ada dugaan diperjualbelikan untuk melenggangkan seseorang maju dalam kontestasi pilpres 2024. Contoh: Isu dinasti politik yang dialamatkan pada Gibran. Selain dari sisi cacat hukum dalam perenggangannya di MK, tergambar jelas bahwa partai politik tersandera dan tak bisa secara otonom memutuskan dalam pencalonan 2024 ini.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Seperti yang disebutkan sebelumnya, Demokrasi merupakan salah satu bentuk mekanisme sistem pemerintahan sebagai upaya mewujudkan kedaulatan yang dijalankan oleh rakyat. Hal ini juga termasuk melibatkan masyarakatnya langsung dalam perkembangan hukum negara, termasuk para mahasiswa. Berdasarkan survei, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan, peneliti mendapat cukup banyak hasil yang beragam dari perwakilan mahasiswa di setiap fakultas yang ada di UPI. Banyak yang merasa lebih baik jika demokrasi modern menggunakan perwakilan rakyat secara langsung. Keresahan mahasiswa ini juga penting untuk diperhatikan terlebih mereka merupakan bagian dari generasi muda penerus negara yang di kemudian hari keberlangsungan demokrasi ada di tangan mereka.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada responden, maupun seluruh pihak yang telah membantu selama proyek survei dan wawancara berlangsung. Begitu juga kepada Dr. Maulia Depriya Kembara, M.Pd. selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas proyek ini. Semoga artikel ini bisa digunakan dengan bijak dan bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ajie Rafi Nur Hakim, Nur Afifah April Yani, Yulia Hana Nurlatifah, & Maulia Depriya Kembara. (2023). Pentingnya penggunaan Bahasa Indonesia di lingkungan kampus sebagai identitas nasional terhadap persatuan. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa*, 2(2), 232–242.
- Amir, A., & dkk. (2022). Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi. Balikpapan: Universitas Megarezky.
- Arrsa, R. C. (2014). Pemilu serentak dan masa depan konsolidasi demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 515-537.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions*. London: SAGE Publications.
- Hatta Utwun Billah, Maharani Ariya Yunita, Muhammad Ananda Pratama, & Maulia Depriya Kembara. (2023). Kesadaran berpancasila dalam mempertahankan identitas nasional. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 1(2), 113-121.
- Hikmah Rahmadini, R., Anjani Sundayani, P., Maftuh, B., & Depriya Kembara, M. (2023). The importance of ethics and integrity in education. *IBERS: Jurnal Pendidikan Indonesia Bermutu*, 2(1), 22–29.

- Mahendra, P. R. A., & Kartika, I. M. (2020). Memperkuat kesadaran bela negara dengan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif kekinian. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 22-28.
- Miriam, B. (2002). *Dasar-dasar ilmu politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan sistem pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333-354.
- Putri, N. N. A., Avianika, K. A., & Kembara, M. D. (2023). Peran Pancasila sebagai upaya membangun etika anak berkebutuhan khusus di masyarakat. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 1(2), 89-96.
- Subadi, T. (2008). *Sosiologi*. Surakarta: BP-FKIP UMS.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Cetakan ke-11)*. Bandung: Alfabeta.
- Widiyaningrum, W. Y. (2019). Menumbuhkan nilai kesadaran Pancasila di kalangan generasi muda: Kajian teoritis. *JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(3), 69-78.
- Widjaja, A. W. (1986). *Manusia Indonesia individu keluarga dan masyarakat*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Yanuar, G. F., Kembara, M. D., Rodihati, R., & Hakim, S. A. N. (2023). Pengetahuan pelajar tentang nilai-nilai Pancasila untuk mempertahankan ideologi negara. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 1(1), 55-69.